

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Proceedding Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Afryansyah, Rahmad Dian. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 0, pp. 702 – 712, Jul. 2013.
- Andrian, Y., dan Samekto, A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Jurnal of Accountung Research and Review*, 10(2). 139-152.
- Ardhini, 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektik Teori Keagenan. *Jurnal* hal 9-11: Universitas Diponegoro. Semarang
- Asoka, R. 2016. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntanika*, No. 2, Vol.2.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan Tahun 2018. www.sulsel.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan Tahun 2018. www.sulsel.bps.go.id
- Bahl, R. W. dan J. F. Linn. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries. Published For The World Bank.*
- Bahl, Roy, 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization, A Paper Prepared for International Seminar on Land Policy and Economic Development, Taiwan: Land Reform Training Institute, hlm. 4-28.*
- Bahl, Roy W. 2000. *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.*
- Balaguer-Coll, Maria T., Diego Prior and Emili Tortosa-Ausina. 2010. *Decentralization And Efficiency of Local Government. Springer-Verlag 2009.*
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta: Erlangga
- Bird, Richard dan Vaillancourt, Francois. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara – Negara Berkembang, Cetakan 1, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (Terjemahan)*

- Canterero, D. 2005. *Decentralization and Health Care Expenditure: The Spanish Case. Applied Economics Letters*, 12.
- DeMello, L. and Barenstein, M. 2001. *Fiscal Decentralisation and Governance: a cross country analysis. IMF Working paper 1 (31)*.
- Depkeu, 2009. Nota Keuangan dan RAPBN 2010.
- Dubois, H. and Fattore, G. 2009. *Definition and Typologies in Public Administration Research: The Case of Decentralisation. International Journal of Public Administration*, 32 (8) 704-727.
- Erfanie, Sri dkk, 2004. Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Escobar-Lemmon, Maria & Ashley D. Ross. 2013. *Does Decentralization Improve Perception of Accountability? Attitudinal Evidence of Colombia. Midwest Political Science Association: Vol. 58*.
- Felix, O. 2012. *Analysis of the Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in the Local Government System of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), 1-6.
- Falleti, T. (2005) A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective. *The American Political Science*, 99 (3) 327-346.
- Fontanella, A. dan H. Rossieta. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Gerardou, Flor Silvestre. 2015. *The Impact of Fiscal Decentralisation On Accountability and Public Entrepreneurship: A Case Of Rural Local Governments In Mexico. King's College London*.
- Ghozali, Imam dan D. Ratmono. 2013. Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8. Edisi Pertama. Penerbit UNDIP.
- Hairiyah, Malisan, L., dan Fakhroni, Z. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Modal, *Journal FEB Unmul*, 14(2), 85-91. <http://dx.doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Kompak*. STIE YO. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Ed. 2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad, Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*. *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*.
- Hayek, F.A. 1945. *The Use of Knowledge in Society*. *American Economic Review* 45: 519–530.
- Heriningsih, Sucahyo, dan Marita. 2013. *Buletin Ekonomi* Vol. 11, No. 1.
- Heriningsih, Sucahyo. 2015. *Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Dan Tingkat Korupsi Di analisis Dari Opini Auditor*. *Univesity Research Colloquium*.
- Hidayah, Nurul dan H. Setiyawati. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01*.
- Hirawan, Susiyati Bambang, 2007. *Desentralisasi Fiskal sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 10.
- Jaeni, G.A.L. 2016. *Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Provinsi Terhadap Belanja Modal*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(1), 13-26
- Jaya, J. D dan Eka Ardhani Sisdyani. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.2 (2014): 285-303.
- Jayanti, E. Dwi dan Priyo Hari Adi. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus Umum (DAU) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi*. *Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018*.
- Jaya, I. P., dan Dwiranda, A. A. N. B. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79-92
- Jin, Jing and Zou, Heng-fu, 2005. *Fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China*, *Journal of Asian Economics, Elsevier, vol. 16(6), pages 1047-1064, December*.

- Juliawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Syiah Kuala*. Volume. Tahun I No. 1.
- Juniawan, M. Ari dan Ni Putu Santi Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281
- Juweny, Siti. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Tesis Universitas Lampung.
- Kadjatmiko, 2002. Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah. *Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi Perencanaan, Strategi Dan Peluang. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Kusnandar dan Siswantoro, D. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pinjam Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Indonesia*, 1-20.
- Ladjin, Nurjanna. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah). Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Lewis, Blane. 2013. *Local Government Capital Spending in Indonesia: Impact of Intergovernmental Fiscal Transfer*. Australian National University.
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., Ho, Tsai-Neng. 2010. *Applying integrated EA/AHP to evaluate the economic performance of local governments in China*. *European Journal of Operational Research*, 209 (2011) 129–140.
- Litvack, J., Ahmad, J. and Bird, R. (1998) *Rethinking decentralisation in Deveoping countries*. Washington, D.C.: World Bank Institute.
- Litvack, Jennie, 1999. *Decentralization, Washington, DC, World Bank*.
- Liu, Chih hung. 2007. *What Type of Fiscal Decentralization System has better Performance*. *School of Public Policy*.
- Mahmudi, Edisikedua, CetakanPertama, (2010). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mangkoesoebroto, Guritno dan A. Tony Prasetyantono, 1994. Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mangkoesoebroto, Guritno, 1999. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Manik, Rikwan, E. S., dan Hidayat, Paidi, 2010. Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara (Metode Cointegration Test dan Granger Causality Test). *Jurnal dan Bisnis*. Vol. 2, No. 1.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mediaty, Darwis, Syahrir, Indrajawati, A. 2015. *Analysis Social Security System Model in South Sulawesi Province: On Accounting Perspective. Procedia-Social and Behavioral Science*, 211 page 1148- 1154.
- Moisiu, Alexander. 2013. *Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences*, pp.459-463
- Mudhofa, K. dan A. Tahar. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No. 2, Hlm: 176-185.
- Mulyana, dkk, 2006. *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan ABBD di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Muraiyah dan Nadirsyah. 2018. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal IMEKA*, Vol. 3 No.2, Hlm: 236-253.
- Musgrave, Richard A dan Peggy B Musgrave. 1992. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*.
- Musgrave, R. A. 1959. *The Theory of Public Finance : A Study in Public Economy*. New York: McGraw Hill.
- Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance: In Theory and Practice*. Mc-Graw Hill. Tokyo: Kogakhusa Ltd.
- Nugraha, I. P., dan Dwirandra, A. A. N. B. 2016. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1). 284-311.
- Nurhidayati, Sri. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Tesis Universitas Lampung.

- Oates, W. E, 1977. An Economist's Perspective on Fiscal Federalism, in: W. E. Oates (ed.), *The Political Economy of Fiscal Federalism*, Lexington, Toronto, 1977.
- Oates, W.E. 1972. *Fiscal Federalism*. New York : Harcourt Brace Javanovic.
- Pandansari, Tiara. 2016. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Volume 19 No 3, Desember 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prud'homme, Remy. 1995. *On The Danger of Decentralization, Washington DC, The World Bank, Policy Research Working Paper, 1252*.
- Purbasari dan Bawono. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Puspita, R dan D. Martani. 2011. Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ramadani, R. Febri. 2016. Analisis Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saputra, Bambang. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator* Volume 8, No. 3.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, H. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.10, No.1, Hal.103-124.

- Saud, I. M., Eka Asterina, dan Gisti Fairuz Trisha. 2020. *Factors Affecting Capital Expenditure Allocation: Emperical Evidence from Regency/City Government in Indonesia*. *Journal of Accounting and Investment Vol. 21 No. 2*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Simanjuntak, Robert A., 2003. *Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Prospek, dan Kebijakan*, Working Paper No. 3, Jakarta: PEM FE UI, hlm. 1-34.
- _____, 2005. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Editor: AnharGanggang. Jakarta: Yayasan Tifa.
- _____, 2010. *Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makro Ekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia*, Prisma, 29 (3), hal. 35-57.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Solihin, Achmad dan Niken Ajeng Lestari, 2010. *Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*, *Majalah Ekonomi*, Vol. XX, No. 1, April 2010:20-34.
- Sugyanta. 2016. *Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 14 No. 1 Juni 2016*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta
- Sukirno, S. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarno, Siswanto, 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Keenam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Hari dkk, 2004. *Otonomi Daerah: Teori dan Kenyataan Empiris*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Syahrudin. 2006. *Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten*.
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Taufiq, Ahmad Burhanuddin. 2010. *Analisis Belanja Publik dan Penerapan Standard Costing pada Manajemen Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Suatu Kajian Alternatif Pendekatan Transfer Fiskal*. Tesis Universitas Indonesia.

- Tiebout, Charles. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy* 64: 416-24.
- Todaro, M. 2006. Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Usman Syaikh, dkk. 2008. *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus(DAK)*. Lembaga Penelitian SMERU.
- Vazques, Jorge Martinez and Robert M. McNab, 1997. *Fiscal Decentralization, Economics Growth, and Democratic Governance*, A Paper Prepared for USAID Conference on Economics Growth, and Democratic Governance, Washington, hlm. 4-20.
- Waluyo, Joko. 2007. *Fiscal Decentralization: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia*, Makalah Pusat Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wekan, Rein Joseph. 2018 Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Maluku. Tesis Universitas Hasanuddin.
- Westin, Susan S. 1998. Performance Measuremnt and Evaluation Definition and Relationship. GAO issued May 2005.
- Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013).Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No.1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Zulynato, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Tesis Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran 1

TABULASI DATA PENELITIAN

KABUPATEN / KOTA	KELAS	TAHUN	X1	X2	Z	Y
Kota Medan	Tinggi	2017	37.49	63.88	40.07	1.000
Kota Medan	Tinggi	2016	35.64	86.35	46.49	1.000
Kota Medan	Tinggi	2015	35.86	53.65	43.42	1.000
Kab. Bekasi	Tinggi	2017	41.26	90.06	47.15	2.700
Kab. Bekasi	Tinggi	2016	41.92	77.90	40.66	2.700
Kab. Bekasi	Tinggi	2015	33.83	90.89	36.17	2.700
Kab. Bogor	Tinggi	2017	36.37	80.23	44.65	2.700
Kab. Bogor	Tinggi	2016	38.37	84.11	47.97	2.700
Kab. Bogor	Tinggi	2015	31.67	84.99	48.86	2.700
Kota Bandung	Tinggi	2017	47.13	89.72	37.47	1.000
Kota Bandung	Tinggi	2016	37.87	95.38	41.11	1.000
Kota Bandung	Tinggi	2015	39.27	98.35	42.82	1.000
Kota Surabaya	Tinggi	2017	55.56	93.68	40.71	2.700
Kota Surabaya	Tinggi	2016	59.92	94.44	41.02	2.700
Kota Surabaya	Tinggi	2015	54.02	100.00	40.96	2.700
Kab. Indramayu	Sedang	2017	13.24	77.11	49.91	2.700
Kab. Indramayu	Sedang	2016	11.22	73.02	49.74	2.700
Kab. Indramayu	Sedang	2015	11.53	77.65	52.17	2.700
Kota Cirebon	Sedang	2017	29.91	84.36	57.03	2.700
Kota Cirebon	Sedang	2016	26.44	73.05	53.51	2.700
Kota Cirebon	Sedang	2015	26.84	55.18	59.62	1.000
Kab. Brebes	Sedang	2017	13.98	82.84	47.62	1.000
Kab. Brebes	Sedang	2016	13.18	73.84	24.98	1.000
Kab. Brebes	Sedang	2015	12.30	86.76	55.35	1.000
Kab. Bantul	Sedang	2017	17.77	84.03	49.46	2.700
Kab. Bantul	Sedang	2016	20.22	84.92	57.45	2.700
Kab. Bantul	Sedang	2015	16.82	86.95	59.30	2.700
Kab. Banyuwangi	Sedang	2017	14.43	74.33	41.77	2.700
Kab. Banyuwangi	Sedang	2016	13.11	84.24	55.26	2.700
Kab. Banyuwangi	Sedang	2015	10.40	78.45	57.71	2.700
Kab. Aceh Barat Daya	Rendah	2017	8.46	55.89	44.08	2.700
Kab. Aceh Barat Daya	Rendah	2016	7.81	38.55	38.55	2.700
Kab. Aceh Barat Daya	Rendah	2015	7.88	31.70	43.70	2.700
Kab. Padang Pariaman	Rendah	2017	6.07	76.96	45.14	2.700
Kab. Padang Pariaman	Rendah	2016	5.38	61.69	93.07	2.700
Kab. Padang Pariaman	Rendah	2015	5.45	71.30	57.66	2.700

KABUPATEN / KOTA	KELAS	TAHUN	X1	X2	Z	Y
Kab. Batanghari	Rendah	2017	7.79	68.60	35.03	2.700
Kab. Batanghari	Rendah	2016	6.84	65.51	38.89	2.700
Kab. Batanghari	Rendah	2015	7.05	86.33	39.47	2.700
Kab. Merangin	Rendah	2017	6.64	69.99	37.82	2.700
Kab. Merangin	Rendah	2016	4.40	62.17	42.57	2.700
Kab. Merangin	Rendah	2015	6.23	55.66	45.06	1.000
Kab. Sanggau	Rendah	2017	5.86	69.68	47.00	2.700
Kab. Sanggau	Rendah	2016	7.04	67.65	41.69	2.700
Kab. Sanggau	Rendah	2015	6.88	69.30	45.79	2.700
Kota Makassar	Tinggi	2017	39.26	68.78	37.83	2.680
Kota Makassar	Tinggi	2016	27.40	71.12	44.05	2.680
Kota Makassar	Tinggi	2015	32.20	84.28	45.17	2.680
Kab. Badung	Tinggi	2017	82.03	79.37	29.08	2.680
Kab. Badung	Tinggi	2016	82.33	81.18	36.02	2.680
Kab. Badung	Tinggi	2015	79.41	98.81	31.01	2.680
Kab. Gianyar	Tinggi	2017	34.79	71.89	35.94	2.680
Kab. Gianyar	Tinggi	2016	31.49	65.09	39.61	2.680
Kab. Gianyar	Tinggi	2015	27.66	91.90	42.29	2.680
Kota Denpasar	Tinggi	2017	41.99	80.87	35.83	2.680
Kota Denpasar	Tinggi	2016	41.53	85.03	44.77	2.680
Kota Denpasar	Tinggi	2015	39.48	96.72	44.03	2.680
Kota Balikpapan	Tinggi	2017	32.16	68.52	45.02	2.680
Kota Balikpapan	Tinggi	2016	28.11	69.20	34.63	2.680
Kota Balikpapan	Tinggi	2015	20.25	95.12	29.94	2.680
Kab. Polewali Mandar	Sedang	2017	10.08	69.86	46.53	2.680
Kab. Polewali Mandar	Sedang	2016	9.72	67.49	49.68	2.680
Kab. Polewali Mandar	Sedang	2015	10.39	71.44	53.82	1.000
Kab. Penajam Paser Utara	Sedang	2017	10.99	55.28	28.88	2.680
Kab. Penajam Paser Utara	Sedang	2016	16.78	66.95	33.97	2.680
Kab. Penajam Paser Utara	Sedang	2015	3.89	88.71	33.80	1.000
Kota Palopo	Sedang	2017	14.55	54.23	43.48	2.680
Kota Palopo	Sedang	2016	13.35	43.60	44.34	2.680
Kota Palopo	Sedang	2015	10.28	50.06	50.69	2.680
Kab. Wajo	Sedang	2017	8.76	59.30	33.87	2.680
Kab. Wajo	Sedang	2016	8.38	71.92	40.24	2.680
Kab. Wajo	Sedang	2015	7.23	52.16	39.79	2.680
Kab. Sidenreng Rappang	Sedang	2017	8.97	37.24	36.84	2.680
Kab. Sidenreng Rappang	Sedang	2016	8.30	51.98	45.16	2.680
Kab. Sidenreng Rappang	Sedang	2015	9.04	48.27	44.73	1.000
Kab. Buol	Rendah	2017	6.57	39.13	37.97	2.680

KABUPATEN / KOTA	KELAS	TAHUN	X1	X2	Z	Y
Kab. Buol	Rendah	2016	5.90	57.33	39.97	2.680
Kab. Buol	Rendah	2015	4.39	33.44	41.94	1.000
Kab. Kepulauan Selayar	Rendah	2017	6.66	56.19	32.64	2.680
Kab. Kepulauan Selayar	Rendah	2016	4.93	51.45	34.78	2.680
Kab. Kepulauan Selayar	Rendah	2015	5.44	63.60	35.98	1.000
Kab. Muna	Rendah	2017	5.43	43.25	75.47	2.680
Kab. Muna	Rendah	2016	3.73	58.71	47.39	2.680
Kab. Muna	Rendah	2015	5.21	54.37	55.47	1.000
Kab. Belu	Rendah	2017	6.51	67.00	45.93	1.000
Kab. Belu	Rendah	2016	9.16	56.11	38.39	1.000
Kab. Belu	Rendah	2015	8.77	51.18	42.38	1.000
Kab. Ende	Rendah	2017	5.30	50.91	42.50	1.000
Kab. Ende	Rendah	2016	5.96	45.25	40.57	1.000
Kab. Ende	Rendah	2015	7.09	58.42	48.09	1.000
Kab. Merauke	Tinggi	2017	6.74	59.79	38.72	4.198
Kab. Merauke	Tinggi	2016	8.46	48.01	31.18	4.198
Kab. Merauke	Tinggi	2015	6.31	32.71	33.10	4.198
Kab. Mimika	Tinggi	2017	7.86	46.50	30.35	4.198
Kab. Mimika	Tinggi	2016	11.69	32.47	27.01	4.198
Kab. Mimika	Tinggi	2015	11.90	23.07	24.91	2.967
Kota Jayapura	Tinggi	2017	12.97	63.58	35.67	4.198
Kota Jayapura	Tinggi	2016	12.89	55.43	32.73	4.198
Kota Jayapura	Tinggi	2015	10.28	68.19	39.75	4.198
Kab. Halmahera Utara	Tinggi	2017	13.44	59.75	24.78	4.198
Kab. Halmahera Utara	Tinggi	2016	8.85	51.54	21.52	4.198
Kab. Halmahera Utara	Tinggi	2015	16.31	59.61	22.50	2.967
Kota Sorong	Tinggi	2017	18.40	53.23	43.54	2.967
Kota Sorong	Tinggi	2016	9.95	43.14	39.05	2.967
Kota Sorong	Tinggi	2015	9.67	62.16	38.02	4.198
Kab. Maluku Tenggara Barat	Sedang	2017	5.38	52.60	25.66	2.967
Kab. Maluku Tenggara Barat	Sedang	2016	3.71	39.21	19.80	2.967
Kab. Maluku Tenggara Barat	Sedang	2015	3.39	51.31	24.75	2.967
Kab. Maluku Tenggara	Sedang	2017	4.18	39.69	27.81	4.198
Kab. Maluku Tenggara	Sedang	2016	6.66	28.04	20.23	4.198
Kab. Maluku Tenggara	Sedang	2015	4.63	43.22	28.65	4.198
Kab. Nabire	Sedang	2017	4.26	45.37	42.59	4.198
Kab. Nabire	Sedang	2016	4.05	33.92	35.11	4.198
Kab. Nabire	Sedang	2015	2.78	47.91	28.59	2.967
Kota Tidore Kepulauan	Sedang	2017	6.02	38.53	36.66	4.198
Kota Tidore Kepulauan	Sedang	2016	5.04	43.99	37.59	4.198

KABUPATEN / KOTA	KELAS	TAHUN	X1	X2	Z	Y
Kota Tidore Kepulauan	Sedang	2015	4.81	72.01	41.34	4.198
Kab. Teluk Bintuni	Sedang	2017	3.14	18.42	18.53	4.198
Kab. Teluk Bintuni	Sedang	2016	2.88	5.69	20.80	4.198
Kab. Teluk Bintuni	Sedang	2015	2.84	26.92	21.30	4.198
Kab. Seram Bagian Timur	Rendah	2017	1.54	46.34	28.58	2.967
Kab. Seram Bagian Timur	Rendah	2016	2.43	37.95	30.91	2.967
Kab. Seram Bagian Timur	Rendah	2015	1.95	20.66	31.95	2.967
Kab. Buru Selatan	Rendah	2017	2.02	30.91	20.89	2.049
Kab. Buru Selatan	Rendah	2016	3.66	32.59	25.26	2.049
Kab. Buru Selatan	Rendah	2015	1.85	29.75	25.77	2.049
Kab. Waropen	Rendah	2017	1.03	15.96	23.36	2.049
Kab. Waropen	Rendah	2016	0.66	0.29	20.26	2.049
Kab. Waropen	Rendah	2015	0.60	23.78	20.04	2.049
Kab. Lanny Jaya	Rendah	2017	1.20	43.28	19.40	2.967
Kab. Lanny Jaya	Rendah	2016	0.78	46.98	18.30	2.967
Kab. Lanny Jaya	Rendah	2015	0.55	24.59	18.81	2.967
Kab. Pulau Taliabu	Rendah	2017	2.15	32.20	25.32	2.967
Kab. Pulau Taliabu	Rendah	2016	1.86	35.20	25.91	2.049
Kab. Pulau Taliabu	Rendah	2015	1.44	21.71	28.69	1.000

Lampiran 2

STATISTIK DESKRIPTIF

	X1	X2	Z	Y
Mean	15.64748	59.86852	38.83059	2.632919
Maximum	82.33000	100.0000	93.07000	4.198000
Minimum	0.550000	0.290000	18.30000	1.000000
Std. Dev.	16.72872	21.74262	11.58911	0.954837
Observations	135	135	135	135

Lampiran 3

UJI ASUMSI KLASIK***Uji Multikolinearitas***

	X1	X2	Z
X1	1.000000	0.641963	0.155750
X2	0.641963	1.000000	0.489874
Z	0.155750	0.489874	1.000000

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

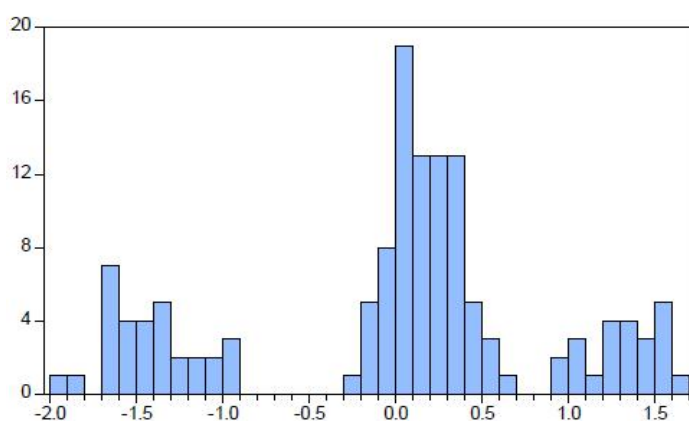
Sample: 2015 2017

Periods included: 3

Cross-sections included: 45

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.830901	0.196369	4.231335	0.0000
X1	-0.003152	0.004189	-0.752583	0.4531
X2	-0.004854	0.003652	-1.329176	0.1861
Z	0.004704	0.005318	0.884593	0.3780

Uji Normalitas

Series: Standardized Residuals	
Sample 2015 2017	
Observations 135	
Mean	-3.36e-16
Median	0.119724
Maximum	1.629885
Minimum	-1.999271
Std. Dev.	0.911886
Skewness	-0.385998
Kurtosis	2.545002
Jarque-Bera	4.516882
Probability	0.104513

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.411 ^a	.169	.156	.575	1.761

a. Predictors: (Constant), Ketergantungan Daerah, Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dasar pengambilan keputusan
(ada tidaknya autokorelasi pada data):

- Nilai: $dw < dl$ atau $dw > 4-dl$ (terdapat autokorelasi)
- Nilai: $du < dw < 4-du$ (tidak terdapat autokorelasi)

Jadi, $du < d < 4-du$

$$1,749 < 1,761 < 2,250$$

Maka,

d	dL	dU	4-dL	4-dU
1,761	1.69	1.75	2.31	2.25

Lampiran 4

UJI HIPOTESIS***Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Analysis)*****Dependent Variable: Y**

Method: Panel Least Squares

Sample: 2015 2017

Periods included: 3

Cross-sections included: 45

Total panel (balanced) observations: 135

White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.934719	0.216991	4.307636	0.0000
X1	0.172092	0.072883	2.361204	0.0204
X2	-0.001432	0.000616	-2.323512	0.0225

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.745665	Mean dependent var	0.463841
Adjusted R-squared	0.612718	S.D. dependent var	0.256746
S.E. of regression	0.159778	Akaike info criterion	-0.561705
Sum squared resid	2.246552	Schwarz criterion	0.449761
Log likelihood	84.91508	Hannan-Quinn criter.	-0.150673
F-statistic	5.608712		
Prob(F-statistic)	0.000000		

Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2015 2017

Periods included: 3

Cross-sections included: 45

Total panel (balanced) observations: 135

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.644162	0.689320	-3.835897	0.0002
X1	0.326660	0.152317	2.144604	0.0348
X2	0.004817	0.002643	1.822407	0.0719
Z	-0.723133	0.296357	-2.440075	0.0168
X1_Z	0.000188	7.44E-05	2.520430	0.0136
X2_Z	-0.000216	8.57E-05	-2.521814	0.0135

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.790419	Mean dependent var	-0.882953
Adjusted R-squared	0.669602	S.D. dependent var	0.448782
S.E. of regression	0.257961	Akaike info criterion	0.406102
Sum squared resid	5.656236	Schwarz criterion	1.482129
Log likelihood	22.58814	Hannan-Quinn criter.	0.843369
F-statistic	6.542280		
Prob(F-statistic)	0.000000		